



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
26. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan, Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2).

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 3 Seri B.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kota Padang Panjang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek pajak adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perkotaan.
11. Nilai Nual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

BAB II
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

Klasifikasi dan penetapan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing wilayah Kecamatan dan Wilayah Kelurahan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Desember 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI B.1

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 26 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013

Tentang : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual
Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

1. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp. /m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp./m ²)	
001	>	67,390,000	s/d	69,700,000	68,545,000
002	>	65,120,000	s/d	67,390,000	66,255,000
003	>	62,890,000	s/d	65,120,000	64,000,000
004	>	60,700,000	s/d	62,890,000	61,795,000
005	>	58,550,000	s/d	60,700,000	59,625,000
006	>	56,440,000	s/d	58,550,000	57,495,000
007	>	54,370,000	s/d	56,440,000	55,405,000
008	>	52,340,000	s/d	54,370,000	53,355,000
009	>	50,350,000	s/d	52,340,000	51,345,000
010	>	48,400,000	s/d	50,350,000	49,375,000
011	>	46,490,000	s/d	48,400,000	47,445,000
012	>	44,620,000	s/d	46,490,000	45,555,000
013	>	42,790,000	s/d	44,620,000	43,705,000
014	>	41,000,000	s/d	42,790,000	41,895,000
015	>	39,250,000	s/d	41,000,000	40,125,000
016	>	37,540,000	s/d	39,250,000	38,395,000
017	>	35,870,000	s/d	37,540,000	36,705,000
018	>	34,240,000	s/d	35,870,000	35,055,000
019	>	32,650,000	s/d	34,240,000	33,445,000
020	>	31,100,000	s/d	32,650,000	31,875,000
021	>	29,590,000	s/d	31,100,000	30,345,000
022	>	28,120,000	s/d	29,590,000	28,855,000
023	>	26,690,000	s/d	28,120,000	27,405,000
024	>	25,300,000	s/d	26,690,000	25,995,000
025	>	23,950,000	s/d	25,300,000	24,625,000
026	>	22,640,000	s/d	23,950,000	23,295,000
027	>	21,370,000	s/d	22,640,000	22,005,000
028	>	20,140,000	s/d	21,370,000	20,755,000
029	>	18,950,000	s/d	20,140,000	19,545,000

030	>	17,800,000	s/d	18,950,000	18,375,000
031	>	16,690,000	s/d	17,800,000	17,245,000
032	>	15,620,000	s/d	16,690,000	16,155,000
033	>	14,590,000	s/d	15,620,000	15,105,000
034	>	13,600,000	s/d	14,590,000	14,095,000
035	>	12,650,000	s/d	13,600,000	13,125,000
036	>	11,740,000	s/d	12,650,000	12,195,000
037	>	10,870,000	s/d	11,740,000	11,305,000
038	>	10,040,000	s/d	10,870,000	10,455,000
039	>	9,250,000	s/d	10,040,000	9,645,000
040	>	8,500,000	s/d	9,250,000	8,875,000
Klas		Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp. /m2)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp./m2)
041	>	7,790,000	s/d	8,500,000	8,145,000
042	>	7,120,000	s/d	7,790,000	7,455,000
043	>	6,490,000	s/d	7,120,000	6,805,000
044	>	5,900,000	s/d	6,490,000	6,195,000
045	>	5,350,000	s/d	5,900,000	5,625,000
046	>	4,840,000	s/d	5,350,000	5,095,000
047	>	4,370,000	s/d	4,840,000	4,605,000
048	>	3,940,000	s/d	4,370,000	4,155,000
049	>	3,550,000	s/d	3,940,000	3,745,000
050	>	3,200,000	s/d	3,550,000	3,375,000
051	>	3,000,000	s/d	3,200,000	3,100,000
052	>	2,850,000	s/d	3,000,000	2,925,000
053	>	2,708,000	s/d	2,850,000	2,779,000
054	>	2,573,000	s/d	2,708,000	2,640,000
055	>	2,444,000	s/d	2,573,000	2,508,000
056	>	2,261,000	s/d	2,444,000	2,352,000
057	>	2,091,000	s/d	2,261,000	2,176,000
058	>	1,934,000	s/d	2,091,000	2,013,000
059	>	1,789,000	s/d	1,934,000	1,862,000
060	>	1,655,000	s/d	1,789,000	1,722,000
061	>	1,490,000	s/d	1,655,000	1,573,000
062	>	1,341,000	s/d	1,490,000	1,416,000
063	>	1,207,000	s/d	1,341,000	1,274,000
064	>	1,086,000	s/d	1,207,000	1,147,000
065	>	977,000	s/d	1,086,000	1,032,000
066	>	855,000	s/d	977,000	916,000
067	>	748,000	s/d	855,000	802,000
068	>	655,000	s/d	748,000	702,000
069	>	573,000	s/d	655,000	614,000
070	>	501,000	s/d	573,000	537,000
071	>	426,000	s/d	501,000	464,000
072	>	362,000	s/d	426,000	394,000
073	>	308,000	s/d	362,000	335,000

074	>	262,000	s/d	308,000	285,000
075	>	223,000	s/d	262,000	243,000
076	>	178,000	s/d	223,000	200,000
077	>	142,000	s/d	178,000	160,000
078	>	114,000	s/d	142,000	128,000
079	>	91,000	s/d	114,000	103,000
080	>	73,000	s/d	91,000	82,000
081	>	55,000	s/d	73,000	64,000
082	>	41,000	s/d	55,000	48,000
083	>	31,000	s/d	41,000	36,000
084	>	23,000	s/d	31,000	27,000
085	>	17,000	s/d	23,000	20,000
086	>	12,000	s/d	17,000	14,000
087	>	8,400	s/d	12,000	10,000
088	>	5,900	s/d	8,400	7,150
089	>	4,100	s/d	5,900	5,000
Klas		Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp. /m2)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp./m2)
090	>	2,900	s/d	4,100	3,500
091	>	2,000	s/d	2,900	2,450
092	>	1,400	s/d	2,000	1,700
093	>	1,050	s/d	1,400	1,200
094	>	760	s/d	1,050	910
095	>	550	s/d	760	660
096	>	410	s/d	550	480
097	>	310	s/d	410	350
098	>	240	s/d	310	270
099	>	170	s/d	240	200
100	≤	170			140

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 26 Tahun 2013
 Tanggal : 31 Desember 2013
 Tentang : Klasifikasi dan Penetapan
 Nilai Jual Objek Pajak
 sebagai Dasar Pengenaan
 Pajak Bumi dan
 Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan

2. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp./m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp./m ²)
001	>	14,700,000	s/d 15,800,000	15,250,000
002	>	13,600,000	s/d 14,700,000	14,150,000
003	>	12,550,000	s/d 13,600,000	13,075,000
004	>	11,550,000	s/d 12,550,000	12,050,000
005	>	10,600,000	s/d 11,550,000	11,075,000
006	>	9,700,000	s/d 10,600,000	10,150,000
007	>	8,850,000	s/d 9,700,000	9,275,000
008	>	8,050,000	s/d 8,850,000	8,450,000
009	>	7,300,000	s/d 8,050,000	7,675,000
010	>	6,600,000	s/d 7,300,000	6,950,000
011	>	5,850,000	s/d 6,600,000	6,225,000
012	>	5,150,000	s/d 5,850,000	5,500,000
013	>	4,500,000	s/d 5,150,000	4,825,000
014	>	3,900,000	s/d 4,500,000	4,200,000
015	>	3,350,000	s/d 3,900,000	3,625,000
016	>	2,850,000	s/d 3,350,000	3,100,000
017	>	2,400,000	s/d 2,850,000	2,625,000
018	>	2,000,000	s/d 2,400,000	2,200,000
019	>	1,666,000	s/d 2,000,000	1,833,000
020	>	1,366,000	s/d 1,666,000	1,516,000
021	>	1,034,000	s/d 1,366,000	1,200,000
022	>	902,000	s/d 1,034,000	968,000
023	>	744,000	s/d 902,000	823,000
024	>	656,000	s/d 744,000	700,000
025	>	534,000	s/d 656,000	595,000
026	>	476,000	s/d 534,000	505,000
027	>	382,000	s/d 476,000	429,000
028	>	348,000	s/d 382,000	365,000
029	>	272,000	s/d 348,000	310,000
030	>	256,000	s/d 272,000	264,000
031	>	194,000	s/d 256,000	225,000
032	>	188,000	s/d 194,000	191,000
033	>	136,000	s/d 188,000	162,000
034	>	128,000	s/d 136,000	132,000

035	>	104,000	s/d	128,000	116,000
036	>	92,000	s/d	104,000	98,000
037	>	74,000	s/d	92,000	83,000
038	>	68,000	s/d	74,000	71,000
Klas		Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp. /m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp./m ²)
039	>	52,000	s/d	68,000	60,000
040	≤	52,000			50,000